

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DI MAN PRAMBON NGANJUK

Sayida Zahra Amalia

Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Kediri
Zahraamalia86923@gmail.com

Abstract: Facilities and infrastructure are the most important things in supporting the process of learning activities in schools. This study aims to examine the implementation of school facilities and infrastructure policies at MAN Prambon Nganjuk through the management of facilities and infrastructure at the school. The research approach used is qualitative with the type of case study. The object of this study is MAN Prambon Nganjuk. Data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation. In the interview the researchers involved teachers, facilities and infrastructure, as well as students. Data analysis techniques in this study used the interactive miles and huberman models, namely data condensation, data display, drawing conclusions. Data validity uses triangulation. The results of the research show that the implementation of school facilities and infrastructure management policies refers to article 40 of the 2008 regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia concerning the standard of facilities and infrastructure for vocational high schools or vocational high schools. Law Number 20 Year 2003 concerning the national education system (National Education System) becomes a reference for making education policy and management at the national, regional and school level. PP No. 19 of 2005 states that the SNP is used as a guideline to realize the availability of learning facilities and infrastructure that allows optimal development of student potential. For this reason, the mechanism for managing school facilities and infrastructure including the procurement, distribution, use and maintenance, inventory and elimination of school facilities and pre-facilities must be carried out effectively and efficiently.

Keywords: policy, facilities and infrastructure

Abstrak: Sarana dan prasarana adalah hal yang paling penting dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi kebijakan sarana dan prasarana sekolah di MAN Prambon Nganjuk melalui pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Objek penelitian ini adalah MAN Prambon Nganjuk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam wawancara peneliti melibatkan guru, waka sarana dan prasarana, serta peserta didik. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif miles dan huberman, yaitu kondensasi data, display data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah mengacu kepada pasal 40 tahun 2008 peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) menjadi acuan untuk membuat kebijakan dan manajemen pendidikan baik pada tingkat nasional, regional, maupun di tingkat sekolah. PP No. 19 tahun 2005 menyebutkan bahwa SNP dijadikan pedoman untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi siswa secara optimal. Untuk itu, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana sekolah meliputi pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi, serta penghapusan sarana dan pra-sarana sekolah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kata kunci: kebijakan, sarana dan prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi parabol, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan pasal 40 tahun 2008 peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan.

Dalam hal pengelolaan pendidikan dibidang sarana dan prasarana sekolah, Penjelasan PP No. 19 tahun 2005 menyebutkan bahwa SNP dijadikan pedoman untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan Untuk itu, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana berkembangnya potensi siswa secara optimal. Untuk itu, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana sekolah meliputi pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi, serta penghapusan sarana dan prasarana sekolah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Indikatornya nampak dari kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip teoritis dan administratif sesuai Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan.

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaannya. (Prihatin, 2011) Dalam pengelolaan pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana terutama kepala sekolah yang langsung menangani sarana dan

prasarana tersebut dan pihak sekolahpun harus dapat memelihara dan memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada. Maka dengan adanya sarana dan prasarana di sekolah siswa dapat belajar dengan maksimal dan seefisien mungkin. Jadi, pengelolaan terhadap sarana dan prasarana harus lebih ditekankan lagi dalam lembaga pendidikan seperti sekolah dan harus ada yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kepala sekolah dapat merencanakan dan mendata apa saja sarana dan prasarana yang harus digunakan di sekolah tersebut. Jika semua langkah-langkah pengelolaan telah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan maka akan berdampak positif terhadap siswa-siswa dalam proses belajar mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Maka penyelenggara pendidikan baik itu pemerintah, kepala sekolah, guru, personil sekolah yang lainnya maupun masyarakat perlu terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman.

Begitu urgennya sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan dalam menunjang keberhasilan organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan, keberhasilan organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan, menjadi sarana dan prasarana menjadi satu bagian dari manajemen yang ada di lembaga pendidikan. Bisa saja diklaim bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. E. Mulyasa mengatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.

Undang-undang (Sistem Pendidikan Nasional, 2003) Nomor 20 Tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) menjadi acuan untuk membuat kebijakan dan manajemen pendidikan baik pada tingkat nasional, regional, maupun di tingkat sekolah. Sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam Sisdiknas, pendidikan nasional bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berperan sebagai subjek pembangunan nasional. Lebih dari itu, pendidikan diharapkan dapat melahirkan SDM yang berkualitas, memiliki kompetensi, berkarakter, dan berdaya saing tinggi, baik pada tingkat regional (ASEAN), maupun internasional di era globalisasi.

Di sini jurnal saya akan membahas tentang implementasi kebijakan sarana dan prasarana di MAN Prambon. Berkaitan dengan itu, komponen pendidikan yang tidak kalah pentingnya, dan bahkan yang banyak menelan biaya adalah sarana prasarana pendidikan. Justru itu standar sarana prasarana dalam peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, harus di uraikan dengan jelas, konkrit dan terukur, sebagaimana standar lainnya yang diuraikan di muka. Dalam penjelasan pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas, tertulis agak rinci, yaitu "standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruangan belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi".

Memang sarana dan prasarana itu memerlukan banyak biaya, namun harus diadakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan. (Pidarta, 2011) Pemenuhan sarana dan prasarana ini, juga berkaitan dengan persyaratan memperoleh izin pendirian dari pemerintah, sebagaimana dirumuskan pada pasal 62 ayat (2) UU Sisdiknas ("syarat-syarat untuk memperoleh izin, meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan").

Jika hal ini dibuat standar yang rinci dan terukur sebagaimana layaknya sebuah satuan pendidikan yang harus memberikan

pelayanan yang baik kepada peserta didik, maka mungkin banyak satuan pendidikan yang tidak dapat diperpanjang izinnya. Jika standar sarana dan prasarana serta standar lainnya tidak terpenuhi, tentu sukar dilakukan standar penilaian yang sama, bagi semua satuan pendidikan dan hasil belajar peserta didik.

Dalam hal ini Edward III (Fryde, 2018) menyatakan ada empat aspek penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan agar berjalan secara efektif yaitu, dari aspek komunikasi (communication), sumberdaya (resources), disposisi dan struktur birokrasi. Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan lebih bersifat praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat disebut dengan rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategik, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Tingkat keberhasilan proses ini, akan dipengaruhi berbagai unsur, baik fisik, sosial maupun budaya. Hal yang perlu diwaspadai adalah dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan kebijakan. Ketika kegagalan kebijakan terjadi, maka perlu dikaji apakah karena perumusan kebijakan tersebut memang buruk atau kesalahan dalam mengimplementasikannya.

Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya. Sebab, berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi kemampuan kebijakan tersebut yang secara nyata dalam mengoprasikan

program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya proses implementasi kebijakan perlu dievaluasi dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil akhir program-program yang dilaksanakan dengan tujuan-tujuan pendidikan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik [yaitu, di lembaga-lembaga pemerintah, yang berarti kementerian / departemen pemerintah] adalah komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana, masing-masing memiliki pengaruh pada implementasi kebijakan publik (Marume, Mutongi, Madziyire, Easton, & Frawley, 2016)

Pemimpin sekolah direkomendasikan bahwa manajer sekolah harus melakukan penilaian komprehensif terhadap fasilitas untuk menentukan analisis kebutuhan kebutuhan. (Asiabaka, 2008). Sedangkan beberapa kepala sekolah masih sangat minim atau sangat kurang tentang pengetahuan tentang manajemen sarpras (Marishane, 2012) Sekolah tidak perlu merekrut atau menyewa personel khusus untuk memelihara fasilitas fisik di sekolah, karena hal tersebut dapat membuat kerugian yang besar bagi sekolah bila merekrut personel yang tidak kompeten (Ibrahim, 2018)

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat efisiensi alokasi fasilitas sekolah dan prestasi akademik siswa (Takwate, 2018), Oleh karena itu tidak hanya perlu untuk mengembangkan strategi untuk mengelola fasilitas pendidikan tetapi juga Perlu dilakukan penelitian lebih dalam pengaruh fasilitas terhadap perilaku dan prestasi siswa. (Hinun, 1999)

Fasilitas atau sarpras sangat mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif di sekolah (Nepal, 2016). Penelitian mengungkapkan bahwa perpustakaan dan laboratorium sekolah secara signifikan mempengaruhi manajemen sarpras di sekolah menengah negeri (Abraham, 2018).

Guru dan siswa harus didorong untuk menanamkan budaya pemeliharaan dalam penanganan fasilitas sekolah di seluruh organisasi sekolah (Uko, 2015). IT merupakan salah satu fasilitas yang utama

untuk dipertimbangkan untuk meningkatkan kepuasan siswa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu di MAN Prambon Nganjuk. (Sugiyono, 2012) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari: tiga orang guru, satu orang waka sarana dan prasarana, dan tiga peserta didik. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif (Miles & Huberman, 1994), yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti merangkum dan memilah-milah data sesuai dengan kategori pertanyaan, memilih data yang dianggap penting dan menyisihkan data-data pelengkap. Setelah data direduksi peneliti menyajikan data yaitu dapat berupa uraian singkat, tabel, foto cetak dan sejenisnya. Proses selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan memahami secara mendalam dan mengambil inti dari hasil penelitian.

Uji keabsahan data yang digunakan yaitu: uji kredibilitas (melalui triangulasi sumber dan teknik), uji *transferability* (melalui penyusunan hasil penelitian secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya), uji *dependability* (melalui audit keseluruhan proses penelitian), dan uji *confirmability* (melalui publikasi hasil penelitian). (Cresswell, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama oleh setiap administrator pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung. Prasarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam prasarana pendidikan. Pertama, prasarana

pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek ketrampilan, ruang laboratorium. Kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantor sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah dan tempat parkir kendaraan. Sarana dan prasarana dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi berarti pada jalannya proses pendidikan hendaknya dikelola dengan baik. Oleh karena itu, peneliti akan mengulas tentang pengelolaan sarana dan prasarana di MAN Prambon mencakup perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah.

Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prambon Nganjuk

Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional dan lokal. Perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program pendidikan dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan ini mencakup, perencanaan pengadaan tanah untuk gedung/bangunan sekolah, perencanaan pengadaan pembangunan, perencanaan pembangunan bangunan, dan perencanaan pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan. (Mulyasa, 2004)

Perencanaan sarana dan prasarana sekolah di MAN Prambon, sudah berjalan dengan baik buktinya ketika peneliti melakukan observasi di sekolah tersebut di sana gedung/bangunan sekolah sudah memadai dan bisa menampung seluruh siswa bahkan sekolah saat ini sedang melakukan pembangunan gedung baru yang akan dijadikan untuk kelas unggulan di masa yang akan datang.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prambon Nganjuk

Untuk pengadaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya untuk pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar dan sebagainya. Dalam pengadaan gedung/bangunan dapat diperlakukan dengan cara membangun baru, membeli, menyewa, menerima hibah dan menukar bangunan. Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot dapat dilakukan dengan jalan membeli. Perabot yang akan dibeli dapat berbentuk yang sudah jadi, atau yang belum jadi. Dalam pengadaan perlengkapan ini juga dapat dilakukan dengan jalan membuat sendiri atau menerima bantuan dari instansi pemerintah di luar Depdiknas, badan-badan swasta, masyarakat, perorangan, dan sebagainya.

Pengadaan sarana dan prasarana sekolah di MAN Prambon Nganjuk belum berjalan dengan baik. Terbukti ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara, di sekolah tersebut masih kekurangan perlengkapan/perabotan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Misalnya saja dalam kegiatan belajar komputer, pengadaan komputer belum memenuhi dengan jumlah banyaknya siswa di sekolah tersebut. Maka dari pihak guru menyuruh siswa untuk membawa laptop sendiri dari rumah guna menunjang kegiatan pembelajaran. Dari pihak pemerintah juga kurang memberikan anggaran yang cukup untuk membeli sarana dan prasarana tersebut, buktinya ketika narasumber mengatakan bahwa sebagian anggaran meminta dari uang wali murid.

Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prambon Nganjuk

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya ada yang berasal dari pemerintah ada juga yang berasal dari usaha sendiri, seperti: membeli, membuat sendiri, sumbangan dan sebagainya. Semua barang yang ada tersebut hendaknya diinventarisir, melalui inventarisasi memungkinkan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas,

tahun pembuatan, ukuran, harga dan sebagainya. Khususnya untuk sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah (milik negara) wajib diadakan inventarisasi secara cermat, dengan menggunakan format-format yang telah ditetapkan, atau mencatat semua barang inventarisasinya di dalam Buku Induk Barang Inventaris dan Buku Golongan Barang Inventaris. Buku Inventaris ini mencatat semua barang inventaris milik menurut urutan tanggal, sedangkan buku golongan barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan.

Dari uraian di atas, inventarisasi sarana dan prasarana sekolah di MAN Prambon Nganjuk sudah tertata dengan rinci dan detail. Terbukti ketika peneliti melakukan observasi di sekolah tersebut terdapat data-data penting mengenai sarana dan prasarana. Berapa jumlah dan jenis barang sudah tersusun dengan baik dalam pembukuannya.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prambon Nganjuk

Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap tetapi lama-kelamaan akan mengarah pada kerusakan. Namun agar sarana dan prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur maka diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap dipergunakan. (Rohiat, 2010)

J. Mamsung pemeliharaan adalah suatu kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukkan bagi kelangsungan "*building*" dan "*equipment*" serta "*furniture*" termasuk penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran serta penggantian. (Mamsung, 1998) J. Mamsung telah mengelompokkan, ada lima faktor yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan, perabot dan perlengkapan, yaitu:

- a. Kerusakan dikarenakan pemakaian dan pengrusakan, baik disengaja maupun yang tidak oleh pemakai.
- b. Kerusakan dikarenakan pengaruh udara, cuaca, musim, maupun keadaan lingkungan.
- c. Kerusakan (*out of date*) disebabkan modernisasi di bidang pendidikan serta perkembangannya.
- d. Kerusakan karena kecelakaan atau bencana disebabkan kecerobohan dalam perencanaan, pemeliharaan, pelaksanaan maupun pengguna yang salah.
- e. Kerusakan karena timbulnya bencana alam, seperti banjir, gempa dan sebagainya.

Menurut waktunya kegiatan pemeliharaan terhadap bangunan dan perlengkapan serta perabot dapat dibedakan menjadi pemeliharaan yang dilakukan setiap hari dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala.

Dari uraian di atas, pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prambon Nganjuk sudah dilakukan dengan baik antara guru dan siswa. Buktinya, ketika peneliti melakukan observasi sarana dan prasarana masih dalam kondisi yang baik. Bahkan siswa dilarang untuk mencoret-coret bangku dan kursi dan jika ketahuan akan diberi sanksi. Ini membuktikan bahwa, guru sangat berperan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan supaya, proses pembelajaran dapat dilakukan dengan nyaman mungkin.

Penggunaan Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prambon Nganjuk

Penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan yang biasa dibantu oleh wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berkaitan dengan penanganan sarana dan prasarana. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah:

- a. Penyusunan jadwal penggunaan harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya.
- b. Hendaklah kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas pertama.

- c. Waktu/jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun ajaran.
- d. Penugasan/penunjukkan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya, misalnya: petugas laboratorium, perpustakaan, operator komputer, dan sebagainya.
- e. Penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah, antara kegiatan intra kurikuler dengan ekstra kurikuler harus jelas.

Penggunaan sarana dan prasarana di MAN Prambon Nganjuk sudah dijalankan dengan sebaik mungkin, buktinya ada penjadwalan tentang penggunaan sarana dan prasarana supaya tidak terjadi benturan antara kelas satu dengan yang lain.

Penghapusan Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prambon Nganjuk

Barang-barang yang ada di lembaga pendidikan berasal dari pemerintah tidak akan selamanya bisa digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, hal ini karena rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, barang tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Dengan keadaan seperti di atas maka barang-barang tersebut harus segera dihapus untuk membebaskan dari biaya pemeliharaan dan meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab lembaga terhadap barang-barang tersebut.

Dari uraian di atas, mengenai penghapusan sarana dan prasarana sekolah di MAN Prambon Nganjuk dilakukan dengan menghibahkan atau memberikan sebagian barang/perabotan yang sudah tidak dipakai lagi ke sekolah lain yang lebih membutuhkan perabotan tersebut. Gunanya supaya barang yang sudah tidak dipakai lagi tidak menumpuk di gudang sekolah dan supaya barang tersebut bermanfaat bagi yang lain.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah mengacu kepada penjelasan pasal 35 ayat (1) UU

Sisdiknas, standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruangan belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) menjadi acuan untuk membuat kebijakan dan manajemen pendidikan baik pada tingkat nasional, regional, maupun di tingkat sekolah. PP No. 19 tahun 2005 menyebutkan bahwa SNP dijadikan pedoman untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi siswa secara optimal. Untuk itu, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana sekolah meliputi pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi, serta penghapusan sarana dan prasarana sekolah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi, peraturan pemerintah tentang implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dengan hasil penelitian yang dilakukan di MAN Prambon Nganjuk belum berjalan secara efisien dan efektif karena masih terkendala dengan anggaran dari pemerintah itu sendiri mengenai pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Terlebih sekolah sudah mengelola dengan baik sarana dan prasarana yang sudah ada guna tercapainya proses pembelajaran yang optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abraham, T. (2018). Influence Of Infrastructural Facilities On The Management. *Journal of Educational Research*, 3(6), 1–12.
- Asiabaka, I. P. (2008). Facilities Management in Schools. *New York Science Journal*, 1(2), 10–21.
- Cresswell, J. W. (2010). *Research design (Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fryde, E. B. (2018). *Financial Resources of Edward III in the Netherlands , 1337-*

- 40 (2nd part). 40, 1142–1216.
- Hinum, B. M. (1999). *Strategies for Managing Educational Facilities Infrastructure*. 1–6. Retrieved from <http://www.oecd.org/edu/innovation-education/2675945.pdf>
- Ibrahim, K. (2018). Secondary Schools' Strategies in Maintenance of Physical Facilities on Costs of Education in Western Region, Kenya. *Journal of Education and Practice*, 9(6), 36-45–45.
- Mamusung, J. (1998). *Hubungan sekolah dan masyarakat*. Bandung.
- Marishane, R. (2012). Management of School Infrastructure in The Context of a No-Fee Schools Policy in Rural South African School: Lessons From The Field. *International Journal of Education Policy and Leadership*, 5(4), 1–13.
- Marume, S. B. M., Mutongi, C., Madziyire, N. C., Easton, D., & Frawley, S. J. (2016). An Analysis of Public Policy Implementation. *IOSR Journal of Business and Management*, 18(4), 86–93. <https://doi.org/10.9790/487X-1804018693>
- Miles, M. B., & Huberman, a M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook*. Sage Publications, Beverly Hills, California USA, 19(1), 1–263. [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(96\)88232-2](https://doi.org/10.1016/0149-7189(96)88232-2)
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Nepal, B. (2016). Relationship Among School ' S Infrastructure Facilities , Learning Environment and Student ' S Outcome. *International Journal for Research in Social Science and Humanities Research*, 2(July), 44–57.
- Pidarta, M. (2011). *Manajemen pendidikan Indonesia*. BAndung: Rineka Cipta.
- Prihatin, Ek. (2011). *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Rohiat. (2010). *Manajemen sekolah teori dasar dan praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sistem Pendidikan Nasional*. , Pub. L. No. NO 20 tahun 2003 (2003).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Takwate, K. T. (2018). Allocation, Availability and Maintenance of School Facilities as Correlate of Academic Performance of Senior Secondary School Students in Adamawa State, Nigeria. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 8(9), 298–307. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.9.2018.p8142>
- Uko, E. (2015). Principalship and Effective Management of Facilities in. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 3(1), 64–76.